

PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA MASA KEMERDEKAAN (SUATU KAJIAN HISTORIS)

Abd. Rasyid Rahman

Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan damai tanpa paksaan, dibawa oleh mubalig yang kebetulan berprofesi pedagang. Kegiatan berdagang tersebut merupakan penopang dalam proses islamisasi. Perkembangan Islam di Indonesia di masa kemerdekaan terlihat pada masa Orde Lama (dalam masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950) berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Sedangkan pada masa Orde Baru, perkembangan Islam salah satunya dilakukan dengan pembaruan pemikiran ajaran Islam. Pada masa Reformasi, perkembangan Islam diwarnai dengan semakin maraknya isu penerapan syariat Islam.

Kata kunci : Indonesia, sejarah, Islam, Masa Kemerdekaan

Abstract

The process of Islamization in Indonesia was peaceful, conducted by Islamic preachers who happened to be traders. Those trading activities were supporting elements in the Islamization process. The development of Islam in Indonesia in the independence era especially in the Old Order era (under the Constitution of 1945, of Republic of the United States of Indonesia, and of the Provisional Constitution of 1950) was in the stage of actualization of religious teachings as the foundation in state-building. In the New Order era the development of Islam was marked by the renewal of the teaching of Islam. In the Reformasi period, the development of Islam was marked by the growing calls for the implementation of Islamic law.

Keywords: Indonesia, history, Islam, Independence era

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara religius, sikap religius tersebut telah dimiliki oleh bangsa ini sejak dahulu. Sebagaimana adanya kepercayaan animisme, kemudian masuknya ajaran Hindu dan Budha yang disusul dengan datangnya ajaran Islam. Proses datangnya Islam di Indonesia menjadi bagian dalam babak sejarah dunia Islam. Islamisasi tersebut melalui priodesasi yang disertai dengan pembagian waktu dan mengikuti pembagian tempat (Sewang, 2005: 5.). Agama tersebut masuk di perairan Nusantara secara damai tanpa paksaan dan tidak melalui peperangan.

Pergerakan Islam dan nasionalis senantiasa jalan beriringan dalam pertarungan ideologi mengawal terwujudnya kemerdekaan dari tangan para kolonial. Sehubungan dengan pembentukan negara baru, kalangan muslim menuntut pembentukan sebuah negara Islam sedangkan pada lain pihak kalangan nasionalis dengan tegas melarang setiap penglebihan terhadap simbol-simbol muslim yang dilekatkan pada pembentukan negara baru tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkanlah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila. Meskipun kalangan muslim menawarkan konsep berbeda yang disisipkan dalam Piagam Jakarta. Substansi kehadiran sila pertama ini di antara lima sila pada dasar negara merupakan pernyataan aktif. Dalam artian negara dan masyarakat Indonesia mesti proaktif untuk mewujudkan makna pernyataan tersebut.

Umat Islam memperjuangkan kemerdekaan dari agresi Belanda yang datang dengan bantuan tentara sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Beberapa tokoh Islam menempati posisi penting dalam ranah politik, baik dalam kabinet maupun memimpin perjuangan fisik dan diplomatik (Yatim, 2008: 267.). Aspirasi perjuangan mereka juga tertuang pada

pembentukan beberapa organisasi dan partai Islam, komunitas tersebut mewarnai perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan.

Keragaman kegiatan Islam semakin mengalami perkembangan sejak dekade 1970-an yang ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan baru Islam; mesjid-mesjid yang dibangun dengan rancangan yang lebih megah, madrasah yang lebih layak, dan pesantren modern yang mengintegrasikan pengetahuan agama dan umum. Pengajian-pengajian agama yang semakin marak, jamaah mesjid semakin ramai. Selain itu, intelektual muda Muslim muncul bersama dengan ide-ide aspiratif untuk masa depan umat (Yatim, 2008: 272-274).

Perkembangan Islam di Indonesia tidak hanya mengalami grafik menukik ke atas namun terkadang mengalami pergeseran ke bawah. Hal ini terjadi karena adanya gesekan kepentingan pemerintah yang kebijakannya terkadang memberikan tekanan pada ruang gerak muslim, khususnya dalam hal yang terkait dengan politik. Hal lain yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia adalah terbentuknya beberapa partai Islam yang kemudian mencoba memasuki dunia politik dengan memperkuat benteng kekuatan masing-masing untuk ikut serta dalam pertarungan perebutan kekuasaan di Indonesia.

METODE

Artikel ini disajikan secara deskriptif analitis dengan menggunakan kajian pustaka. Seperti layaknya tulisan sejarah pada umumnya, tulisan ini menggunakan empat tahap penelitian. Empat tahap penelitian ini merupakan suatu bagian yang saling berurutan dan saling berkaitan. Tahapan penelitian tersebut adalah pengumpulan sumber (*heuristic*), kritik sumber, interpretasi dan histografi. Untuk tahap pengumpulan sumber, penelitian mengumpulkan tulisan-tulisan berupa

buku, artikel yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Untuk itu, peneliti telah menyisir ke beberapa perpustakaan baik itu perpustakaan yang ada di Makassar maupun perpustakaan di Jakarta. Untuk menguatkan informasi yang peneliti peroleh dari sumber tulisan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa sejarawan dan pemerhati sejarah. Hal ini dilakukan untuk menguatkan sumber tertulis yang peneliti peroleh.

PEMBAHASAN

Bentuk negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan berbentuk Republik yang sistem pemerintahannya bersifat presidential. Kepala negara dan pemerintahannya disebut Presiden. Luas wilayah Negara Republik Indonesia 1. 904.570 km², ibu kotanya terletak di Jakarta. Kemajemukan masyarakat Indonesia melahirkan beberapa etnis; Jawa 45%, Sunda 14%, Madura 8%, Melayu 7%, dan lainnya 26%. Beberapa bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Sunda, Arab, Cina, dan dialek lokal. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, pendapatan per kapitanya sebesar 1, 635. 50 U. S. \$. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah, hasil buminya pun sangat beragam; minyak tanah, emas, intan permata, gas bumi, batubara, nikel, dan lain-lain. Sektor perekonomiannya berupa hasil pertanian dan perkebunan, sumber daya laut dan sumber daya hutan. Menghasilkan bahan baku berupa padi, kopi, cengkeh, coklat, teh, kelapa, kelapa sawit, kacang, ikan, rumput laut, karet, kayu jati dan lain-lain (lihat David Joel Steinberg, "Republic of Indonesia", *Microsoft Encarta 2009 [DVD]*, Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008).

Berdasarkan data statistik 2008 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237. 512. 360 jiwa, jumlah penduduk Muslim 87%, penduduk beragama Protes-

tan 6%, Katolik 3%, penduduk beragama Hindu 2%, penduduk beragama Budha 1% (lihat David Joel Steinberg, "Republic of Indonesia", *Microsoft Encarta 2009 [DVD]*, Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008) dan penduduk yang menganut agama lain sebanyak 1%. Realitas keragaman agama di Nusantara (*Indonesia red*) terlihat sangat jelas, berdasarkan sensus yang dilakukan oleh BPS 2003, sekitar 177 juta penduduk Indonesia beragama Islam, dan sekitar 23 juta penganut 4 agama resmi lain, sedangkan selebihnya sekitar setengah juta orang adalah penganut agama lokal yang tidak diakui keabsahannya oleh Negara (lihat <http://wwiv.depag.go.id>).

Proses Masuknya Islam di Indonesia

Pembahasan mengenai proses masuknya Islam di Indonesia akan memberikan informasi tentang tiga hal yang saling terkait. *Pertama*, informasi tentang pembawa Islam masuk ke Indonesia. Literatur atau sumber-sumber sejarah tentang Islamisasi di Nusantara menginformasikan bahwa Islam datang dibawa oleh orang-orang Arab mubalig yang kebetulan berprofesi pedagang. Pembawa Islam tersebut dapat disebut sebagai mubalig pedagang. Mereka membawa barang-barang dagangan yang mendukung proses penyebaran Islam. Dikatakan mubalig karena mereka menguasai pengetahuan agama secara komprehensif.

Kedua, informasi tentang waktu masuknya Islam di Indonesia. Informasi tentang hal ini sangat beragam berdasarkan daerah di mana Islam berkembang. Sebagaimana hasil seminar yang di adakan di Medan pada tahun 1963 dan di Aceh pada tahun 1980 menyimpulkan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad 1 H dan dibawa dari Arab. Munculnya tesis baru ini, yakni Islam masuk di Indonesia pada abad pertama hijriyah sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi merupakan pembetulan dari pendapat yang berkembang sebelum-

nya. Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa masuknya Islam di Indonesia tidak bersamaan, ada daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam, ada pula yang terbelakang dimasuki oleh Islam (Daulay, 2007: 12-13).

Ketiga, informasi tentang tempat Islam pertama kali masuk. Informasi tentang hal ini diwarnai dengan beragam pendapat. Asumsi-asumsi tersebut disimpulkan juga dengan beragam pendekatan. Salah satunya adalah asumsi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatra Utara. Realitas bahwa pesisir Sumatra Utara sebagai persinggahan pelayaran memperkuat interpretasi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatra Utara. Para saudagar yang berlayar ke Asia Timur melalui Selat Malaka singgah di Pantai Sumatra Utara untuk memperoleh tambahan bekal yang mulai berkurang, seperti makanan, minuman dan kebutuhan lainnya (Daulay, 2007: 12-13).

Pendapat senada dikemukakan oleh Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa salah satu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia menyatakan, Islam masuk pertama kali di pesisir Aceh pada abad ke-1 H/7 M. Pendukung teori ini, menurut Azyumardi Azra, di antaranya Syed Muhammad Naquib al-Attas dan beberapa sejarawan Nusantara seperti Hamka, A. Hasjmi, dan M. Yunus Jamil. Selain mereka, teori ini juga didukung oleh penulis-penulis asing seperti Niemann, De Holander, Keyzer Crawford, dan Veth (Azra, 1994: 31).

Terbentuknya komunitas muslim pada tempat tertentu melalui proses yang panjang yang dimulai dengan pembentukan pribadi muslim sebagai output dari usaha para pembawa Islam. Komunitas muslim tersebut selanjutnya menumbuhkan kerajaan Islam. Tercatatlah berdasarkan sejarah sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti kerajaan Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, dan

Demak (Hasjmy, 1989: 143). Kekuasaan yang ada pada kerajaan-kerajaan tersebut membantu proses Islamisasi di beberapa wilayah kekuasaannya.

Senada dengan hal tersebut Uka Tcandrasasmita sebagaimana dikutip oleh Badri Yatim mengemukakan bahwa saluran-saluran islamisasi yang berkembang ada enam, yaitu; saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, politik, pendidikan dan kesenian. Islamisasi melalui saluran pendidikan, baik pada pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kyai dan ulama-ulama. Mereka dibekali pengetahuan agama dan kemudian kembali ke kampung halaman dan menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat di daerahnya tersebut (Yatim, 2008: 201-203). penyebaran Islam di Indonesia tidak dapat dipahami hanya berpegang pada suatu teori tertentu. Penggunaan beberapa teori yang ada dapat memberikan gambaran yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Islam pada mulanya diperkenalkan oleh para muballig pedagang yang melakukan kontak dagang dengan penduduk pribumi Nusantara.

Dalam sejarah Nusantara masalah perdagangan, pembentukan kerajaan, dan islamisasi adalah proses yang saling beriringan dan membentuk sifat utama perkembangan sejarah Islam. Para pedagang muslim internasional kerap kali didampingi oleh para guru pengembara. Dengan dukungan para penguasa, pedagang dan guru-guru pengembara muslim tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi dan juru dakwah yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal (Yatim, 2008: 201-203).

Dengan demikian hubungan antara muballig pedagang dengan penduduk setempat menjadi semakin erat. Pada masa awal saudagar-saudagar muslim yang dikenal cukup mendominasi memberikan pengaruh terhadap proses perkembangan nilai-nilai Islam terutama ketentuan-

ketentuan hukum Islam mengenai perdagangan yang memberikan keuntungan ekonomi secara maksimal.

Kehadiran muslim saudagar menjadikan kota-kota perdagangan sebagai pusat ekonomi, yang pada akhirnya mendukung kegiatan pengembangan Islam. Kegiatan perdagangan yang maju memungkinkan terselenggaranya pengajaran Islam dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam sehingga menciptakan kehidupan beragama yang dinamis. Dinamika ummat Islam di perkotaan akhirnya mampu memperkuat penetrasi Islam sampai ke pelosok Nusantara (Azra, 1991: xiv).

Cara penyebaran Islam lainnya adalah dengan cara kekuasaan. Cara ini sangat penting bagi perluasan Islam di Nusantara. Agama yang dianut oleh penguasa akan mudah diikuti rakyat dan dukungannya secara tepat. Keputusan penguasa dapat mempengaruhi penguasa-penguasa lainnya untuk memeluk agama Islam sehingga Islam berkembang dengan cepat. Setelah berdirinya kerajaan Islam, penguasa memelopori berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari dakwah Islam, pembangunan mesjid-mesjid, sampai penyelenggaraan pendidikan Islam. Pengembangan beberapa hal inilah yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia selanjutnya.

Perkembangan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Masa Orde Lama

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, M. Hatta berhasil meyakinkan bahwa tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi.

Namun hal yang sedikit melegahkan hati para nasionalis Islam adalah keputusan tentang diadakannya Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan (lihat B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta : Grafiti Preaa, 1985), h. 110; bandingkan dengan Badri Yatim, *op tit*, h. 266).

Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun hal tersebut tidak meredakan konflik ideologi pada masa setelahnya. Setelah dikeluarkannya maklumat tentang diperkenankannya mendirikan partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali, yaitu; Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 7 November 1945 lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam, Partai Sosialis yang mengkristalkan falsafah hidup Marxis berdiri 17 Desember 1945, dan Partai Nasional Indonesia yang mewadahi cara hidup nasionalis “sekuler” muncul pada 29 Januari 1946. Partai-partai yang berdiri pada saat itu dapat dikategorikan dalam tiga aliran utama ideologi yang ada tersebut.

Sejak tahun 1950 sampai 1955 PNI dan Masyumi terlibat perselisihan mengenai peran Islam dan peran komunis. Tetapi kalangan muslim sendiri saling berseberangan. Misalnya pada tahun 1952 *Nahdatul Ulama* (NXJ) menarik diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang mandiri. Terjadi pula perselisihan antara kaum tua dan kaum muda dan antara Muhammadiyah dan NU mengenai orientasi keagamaan. Pergolakan yang tidak terselesaikan antara beberapa partai politik yang mengantarkan sebuah pemilihan nasional (pemilu) tahun 1955 yang terbukti sebagai sebuah peristiwa yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 tersebut mengkonsolidasikan bentuk baru ideologi Indonesia dan organisasi sosial, bahkan mengembangkan sebuah kelanjutan dari masa lalu yang nyata Indonesia. Sejak masa itu sampai sekarang, beberapa partai muslim telah berjuang

untuk menyadari bahwa meskipun Indonesia secara mayoritas dalam adalah sebuah masyarakat muslim, namun partai muslim merupakan sebuah minoritas politik.

Perdebatan mengenai hasil perundangan terakhir Piagam Jakarta terus berlanjut hingga periode pasca kemerdekaan dan menjadi argumen bagi gerakan-gerakan separatis, seperti Darul Islam (Ainal dan Samsu Rizal Pangabean, 2004: 65) di Jawa Barat dari 1948 hingga 1962 dan juga di Sulawesi Selatan dan Aceh. Dalam Majelis Konstituante, sejak berakhirnya pemilu 1955 yang dilaksanakan berdasarkan UUDS 1950, kalangan islamis melahirkan tantangan lain bagi negara model Pancasila ini. Karena tidak ada satu pihak pun yang memenuhi 2/3 suara yang dibutuhkan untuk pengesahan, Soekarno akhirnya membubarkan Majelis Konstituante dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Mei 1959 (lihat Mohammad Atho Mudzar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*).

Perkembangan Islam pada masa orde lama, (masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950) berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin (1959 - 1966) golongan Islam mendapat tekanan melalui dominasi peranan golongan komunis yang membonceng kepada pemerintah.

Masa Orde Baru

Munculnya orde baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya. Sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun

realitasnya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah rezim baru orde baru karena pemerintah orde baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik, pemerintah menghendaki partai politik diciutkan menjadi dua ditambah partai Golkar. Partai Islam disatukan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP: 5 Januari 1973) dan partai-partai nasional serta partai Kristen dan Katolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI: 10 Januari 1973) (lihat Jamhari "Islam di Indonesia" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dimamika Masa KM Jilid 6* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 345.)

Awal 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Menjelang diadakannya pemilihan umum pertama pada masa orde baru, Nurcholis Madjid sebagai intelektual menggagas perlunya pembaraan pemikiran dalam Islam. Gagasan Cak Nur tersebut menunjukkan secara jelas penolakan terhadap pandangan yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi politik dengan jargon "Islam yes, partai Islam no". Selain beliau, masih ada beberapa pembaharu seperti Harun Nasution dan Abd Rahman Wahid juga berperan dalam gagasan tersebut. Di samping perkembangan pemikiran keislaman oleh cendekiawan Muslim di Lingkungan Islam seperti di IAIN, pesantren, organisasi Islam, corak pemikiran di IAIN mulai pertengahan 1980-an sampai dengan pertengahan 1990-an, menjadi salah satu kiblat perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Perkembangan pemikiran keagamaan di IAIN ditandai dengan maraknya kajian keagamaan yang menggunakan pendekatan ilmu sosial (lihat Jamhari "Islam di Indonesia" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dimamika Masa KM Jilid 6* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 345.

Pada bidang pendidikan Islam, pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang pertama di Indonesia. Pada awalnya pesantren lebih merupakan lembaga keagamaan daripada lembaga pendidikan agama. Seiring dengan perkembangan zaman pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan agama yang mengajarkan materi keagamaan, namun pada perkembangan selanjutnya pesantren mengadopsi sistem modern sehingga pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga pelajaran umum dengan menggunakan teknologi maju.

Pada masa ini pula, perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fiqh yang diusulkan oleh ulama Indonesia, misalnya Hasbi al-Shiddieqy dan Hazairin, yang keduanya meninggal dunia pada 1975. Hasbi al-Shiddieqy mengajukan konsep “Fiqh Indonesia” dan berusaha menekankan pentingnya merevisi fiqh tradisional yang tidak mempertimbangkan karakteristik komunitas Islam di Indonesia. Sedangkan Hazairin mengajukan konsep “Fiqh Mazhab Nasional” dengan rujukan agar lebih relevan dengan adat dan budaya di Indonesia (lihat Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 215). Selain itu konsep “Reaktualisasi Ajaran Islam” juga disampaikan oleh Munawir Sjadzali sebagai upaya reinterpretasi terhadap doktrin Islam. Menyusul konsep “Fiqh Sosial” yang diajukan oleh Ali Yafie.

Masa Reformasi

Runtuhnya Orde baru pada 21 Mei 1998, bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial. Isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Khusus untuk isu penerapan syariah, secara umum ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut (An-Na'im, 2007: 399). Namun,

perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah 1999 menambah kerumitan situasi ini karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah di tingkat kabupaten dan provinsi, tanpa memperhatikan sikap dan posisi pemerintahan pusat.

Menyusul lengsernya rezim Soeharto, muncul kembali seputar hubungan Islam, negara, masyarakat serta peran Islam dalam Indonesia Baru. Banyak partai Islam seperti PPP dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, kembali mengusung isu Piagam Jakarta dalam sidang Tahunan MPR. Namun usaha untuk mengamandemen UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta gagal diwujudkan karena seimua fraksi lain di MPR menolaknya (An-Na'im, 2007: 431).

Selama periode ini pula sejumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah diberikali hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain (misalnya provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten dan beberapa kabupaten lain) juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Sekalipun tuntutan tersebut disuarakan dari waktu ke waktu, tidak terdapat konsep yang jelas tentang syariat yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana. Di antara keramitan yang muncul di dalamnya adalah kalangan umat Islam sendiri masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkrit rumusan syariat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan hubungan Islam, negara, dan masyarakat yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial, seringkali bersifat simbolik yang menyelubungi persoalan politik dan

sosial lainnya, tanpa adanya kejelasan sikap dan pandangan para tokohnya, yang mendasari penolakah terhadap klaim dan penegasan pihak lain yang ditentangnya. Selain itu, meskipun Islam tidak pernah menjadi agama resmi negara, diskursus keislaman mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan negara, kendati masih adanya ambivalensi di kalangan kelompok Islam sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan damai tanpa paksaan, dibawa oleh muballig yang kebetulan berprofesi pedagang. Kegiatan berdagang tersebut merupakan penopang dalam proses islamisasi. Secara umum Islam masuk di Indonesia pada tahun pertama hijriyah bertepatan dengan tahun ke-7 dan ke-8 Masehi. Daerah yang pertama tempat tersebarnya agama Islam adalah Pesisir Sumatera Utara.

Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan terlihat pada masa orde lama dalam (masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RTS 1949 dan UUDS 1950) berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Sedangkan pada masa Orde Baru, Perkembangan Islam salah satunya dilakukan dengan pembaruan pemikiran ajaran Islam. Pada masa Reformasi Reformasi, perkembangan Islam diwarnai dengan semakin maraknya isu penerapan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik et al. 2005. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara Jilid 5*. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Ali, Mukti. 1974. *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal

Pangabeian. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet.

An-Na'im, Abdullah Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekalar: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Cet. I; Bandung: Mizan.

Azra, Azyumardi. 1991. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.

Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Utama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.

Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta : Grafiti Preaa.

Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana.

Hasjmy, A. 1989. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.

Jamhari. 2005. "Islam di Indonesia" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dimamika. Masa Kini Jilid 6*. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

M Lipidus, Ira. 2000. *A Hisory of Islamic Societies* diterjemahkan oleh Ghufon A. Mas'ad dengan judul ' *Sejarah Sosial Umat Islam*', bagian ketiga. Cet. II; Jakarta : PT.Raja Grafmido Persada.

Mahendra, Yusril Ihza. 1999 *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at al-Islami (Pakistan)*. Cet. I; Jakarta: Paramadina.

Mudzar, Mohammad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Departemen Agama RI.

Nourouzzaman Shiddieqy. 1997. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. 2000. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif dan Ideologi*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sewang, Ahmad M. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Steinberg, David Joel. 2008. "Republic of Indonesia", *Microsoft Encarta 2009 [DVD]*, Redmond, WA: Microsoft Corporation.

www.depag.go.id

Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. XX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.